

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian dan temuan di lapangan terhadap dampak kebijakan transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Satuan Pemukiman (SP) 1 Nagari Padang Tarok, berdasarkan teori dampak kebijakan menurut Thomas R. Dye dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Satuan Pemukiman (SP) 1 Nagari Padang Tarok secara umum telah membawa dampak positif, terutama dalam aspek pembangunan fisik dan sosial ekonomi.

Kebijakan ini berhasil memindahkan dan menempatkan ratusan kepala keluarga dari berbagai daerah ke lokasi transmigrasi ini, serta memberikan dampak positif bagi transmigran dalam kepemilikan lahan, tempat tinggal, dan kesempatan usaha terutama pertanian untuk mendorong peningkatan kesejahteraan transmigran. Selain itu, kebijakan transmigrasi juga turut mendorong pembangunan infrastruktur seperti jembatan beton dan akses jalan menuju transmigrasi yang membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal Nagari Padang Tarok yaitu pemanfaatan lahan menjadi perkebunan sawit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan

transmigrasi berkontribusi terhadap pengembangan wilayah dan membuka peluang bagi pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Rata-rata pendapatan rumah tangga transmigran meningkat menjadi ±Rp1.800.000 per bulan, menunjukkan kemajuan ekonomi meski belum signifikan. Tingkat kemiskinan Nagari Padang Tarok pada 2024 diperkirakan masih ±305 rumah tangga miskin. Potensi ekonomi jangka panjang cukup besar berkat dominasi usia produktif dan terbentuknya kelompok tani, namun pengembangannya sangat bergantung pada dukungan pelatihan, modal, dan infrastruktur.

Namun, pelaksanaan kebijakan transmigrasi ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam pencapaian tujuan secara optimal. Tantangan utama yang dihadapi transmigran adalah keterbatasan infrastruktur jalan sebagai sarana distribusi, yang berdampak pada rendahnya produktivitas hasil pertanian dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat transmigran. Hal ini bahkan berpengaruh terhadap sektor pendidikan, dimana beberapa anak harus berhenti sekolah karena harus membantu keluarganya. Kemudian juga terdapat transmigran yang memutuskan kembali ke daerah asal. Bantuan keberangkatan dan Jaminan Hidup (Jadup) efektif menopang kebutuhan awal transmigran, tetapi distribusinya kurang merata. Dari segi sosial budaya, masyarakat transmigran juga menghadapi tantangan karena diwajibkan untuk “*mangaku induk*” sebagai syarat diterima dalam struktur masyarakat adat setempat.

Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan, seperti dalam pemilihan informan penelitian yang hanya berfokus pada masyarakat transmigran penempatan pertama yang ditempatkan pada Tahun 2016, serta keterbatasan waktu untuk mengobservasi perkembangan ekonomi dan sosial transmigran dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan belum sepenuhnya mampu menggambarkan secara kuantitatif seberapa besar dampak kebijakan ini terhadap perubahan ekonomi dan sosial transmigran.

## 6.2 Saran

1. Pemerintah dan instansi terkait perlu memberikan perhatian serius terhadap perbaikan akses jalan utama dan jembatan yang menghubungkan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) SP 1 Nagari Padang Tarok dengan pusat Nagari Padang Tarok. Kondisi jalan utama yang buruk ini menjadi hambatan masyarakat transmigran dalam mobilitas dan distribusi hasil panen. Perbaikan ini diperlukan agar kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar. Selain itu, diperlukan juga perbaikan pada fasilitas pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigrasi ini.
2. Pemerintah Nagari dan Niniak Mamak Padang Tarok diperlukan pendekatan yang lebih terbuka dan bertahap dalam proses penerimaan masyarakat transmigran ke dalam adat di Nagari Padang Tarok. Diperlukan ada sosialisasi dan dialog bersama agar proses ini

dapat dijalani dengan lebih mudah dan tidak membebani masyarakat transmigran.

3. Pemerintah daerah melalui dinas terkait disarankan untuk melaksanakan program pelatihan keterampilan pertanian berkelanjutan, seperti teknik budidaya tanaman unggulan dan pengolahan hasil pertanian, serta pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Pendampingan usaha secara berkala akan membantu masyarakat transmigran meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonominya. Serta, diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi berbasis koperasi sebagai sarana untuk meningkatkan akses modal, sarana produksi, dan pemasaran hasil pertanian.
4. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan transmigrasi di UPT SP-1 Nagari Padang Tarok. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran, dengan melibatkan partisipasi aktif perwakilan masyarakat transmigran dan masyarakat lokal.